

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim R, S. R. & A. A. (2022). Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 1053–1066.
- Afiff Senen, Z. (2021). Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 265–279. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art4>
- Ari, A. A. I., Dewi, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2021). *Negeri Denpasar*. 10(7).
- Aryuniwati, A., & Yanto, Y. (2020). Optimalisasi polri dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 62–81. Diambil dari <https://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1196%0Ahttps://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/download/1196/804>
- Bale Bandung. (2019). *SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN*. 1–5.
- Bennaris Kaban. (2021). *Ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan perspektif politik hukum pidana*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bill Clinton P. Simanjorang, P. S. (2014). *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah*. 85(1), 1–14.
- Budiman, M. (2022). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No(4),

4929–4937.

Dhaniar Eka Budiastanti. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22–32. <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>

Dien Kalpika Kasih. (2018). *Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Vol 4 No 1*, 1–23.

Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*.

Kastro, E. (2020). Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2439>

KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 72–75. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2345.72-77>

Kuswandi, K., & Nasichin, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8(2), 236–261. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>

Lamtiur Butar-Butar, M. E., Serikat, N., Jaya, P., & Dwi Baskoro, B. (2016). Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–14.

Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9080.

Medan, U., & Area, M. (2018). Uraian Teori Perlindungan Hukum. *Pemutusan*

Hubungan Kerja, (1), 1–12.

Muhammad, F. (2007). Alternatif Penyelesaian Pertikaian Melalui Mekanisme Informal (Non-Yustisil). Diambil dari <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=39218>

Muhammad Yunus Idy. (2013). *Mekanisme Hukum Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Internet*. (1193), 49–61.

Muwahid. (2017). *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 7 (1), 230-245. 235.

Nasrullah. (2016). *Media Sosial*.

Ni Luh Ariningsih Sari. (2023). *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Iti Dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (November 2022), 124–130.

Novianty, E. (2011). *Analisa Perbuatan Melawan Hukum*. 23–54.

Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*.

Pratiwi, W. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi*. 21, 1–9.

Priyanto, I. P. E. J. dan I. M. D. (2020). *Kompilasi Hukum Perikatan, Kertha Wicara, vol. 9 (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2020)*. 9.

Purnomo, H., & Janni W, A. M. (2022). Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi. *Jurnal JURISTIC*, 3(02), 142. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3238>

R. Abdoel Djamali, S. . (2009). *Pengantar Hukum Indonesia Ed. 2*.

Rahmad, N. (2019). *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*.

- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>
- RAS R. (2010). *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana. Raih Asa Sukses*. Diambil dari http://elibrary.uit.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4440
- Rr. Susana Andi Meyrina. (2019). Restorative Justice in the Islamic Penal Law. *Jurnal Rechtsens*, 17–40.
- Rulli, N. (2015). *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*.
- Sagala, M. J. P. (2021). *Hukum dan Cybercrime*.
- Solim, J. (2019). Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Hukum Samudra Keadilan*, 5(1), 96–109. Diambil dari file:///D:/3.SEMESTER 3/1. Pengantar Tata Hukum Indonesia/4.tugas/bahan/jual beli online.pdf
- Widodo. (2011). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Aswaja Presindo.
- Wiwik, M. dan, & Meilararti. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*.
- Wulandari, S. (2021). Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik. *Spektrum Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.2388>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.